

PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN MUSLIM TERHADAP PEREDARAN MAKANAN HARAM DI INDONESIA

Oleh : Yulkarnain Harahab^{*)}

A. Pendahuluan

Makanan atau pangan merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia disamping sandang dan papan. Mengingat arti penting pangan tersebut, pangan harus senantiasa tersedia cukup setiap waktu, aman, bermutu, bergizi dan beragam dengan harga yang terjangkau oleh daya beli masyarakat. Di samping itu bagi seorang muslim ada satu syarat lagi, yaitu bahwa pangan tersebut haruslah halal. Hal ini didasarkan pada ketentuan Allah yang tercantum dalam Al-Qur'an yang menyuruh manusia (muslim) untuk makan makanan yang halal lagi baik (*halalan thayyiban*).

Beberapa makanan yang tidak halal (haram) untuk dikonsumsi oleh umat Islam secara rinci telah disebutkan dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Adanya pengharaman beberapa jenis makanan ini bukan dimaksudkan untuk mempersempit atau menyusahkan manusia, melainkan semata-mata untuk kemaslahatan manusia itu sendiri baik jasmani maupun rohani dari dunia sampai akhirat. Dengan perkembangan teknologi yang sangat pesat, telah dihasilkan produk-produk makanan baru yang kadang-kadang menimbulkan keraguan tentang halal haramnya mengingat makanan tersebut seringkali dibuat dari bahan dasar yang halal namun dalam proses produksinya ditambahkan bahan yang haram. Mencuatnya kasus MSG (*monosodium glutamate*) Ajinomoto yang bermula dari penggantian salah satu bahan *polypeptide*

kepada *bactosoytone* dalam proses pengembangan kultur bakteri yang ternyata mengandung enzim babi adalah salah satu contoh polemik halal haramnya MSG tersebut. Dalam kasus ini permasalahannya bertolak pada pertanyaan bagaimana hukumnya menggunakan bahan tersebut (*bactosoytone*) sebagai katalisator (media), bukan sebagai bahan baku untuk membuat MSG. Majelis Ulama Indonesia (MUI) setelah melakukan pengkajian secara seksama mengeluarkan fatwa bahwa hukum penggunaan *bactosoytone* itu haram dan karenanya meminta pihak Ajinomoto mengganti bahan tersebut dengan bahan lain yang halal.² Di pihak lain Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) saat itu menyatakan bahwa Ajinomoto adalah halal dan Matori Abdul Jalil dengan enteng menyatakan bahwa fatwa Gus Dur itulah yang benar dan fatwa MUI memiliki muatan politik. Adanya polemik tersebut telah menimbulkan kebingungan di kalangan masyarakat tentang kehalalan Ajinomoto. Hal lain yang juga mempunyai potensi menimbulkan keresahan di kalangan konsumen muslim adalah rencana pemerintah mengimpor paha ayam dari Amerika Serikat. Alasannya adalah bahwa walaupun ayam merupakan binatang yang halal untuk dimakan, namun jika tata cara penyembelihannya tidak sesuai syariat Islam maka akan menimbulkan keraguan akan kehalalannya.

Sebelum munculnya kasus seperti di atas, sebenarnya pernah terjadi kasus lain yang cukup meresahkan umat Islam yaitu adanya isu lemak babi pada beberapa produk makanan dan

^{*)} S.H., Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

¹ Al-Qur'an Surat (Q.S.) Al-Baqarah : 168

² Republika, 16 Januari 2001, h. 2

kosmetika yang terjadi tahun 1988. Kasus tersebut berawal dari hasil penelitian salah seorang dosen Universitas Brawijaya Malang yang menyatakan bahwa ada beberapa makanan atau kosmetika mengandung *gelatin*, *shartening*, dan *lard*, dimana ketiga bahan tersebut kebanyakan terbuat dari lemak babi.

Adanya beberapa kasus di atas menimbulkan pertanyaan sejauh manakah perlindungan hukum konsumen muslim terhadap peredaran makanan haram dalam hukum positif di Indonesia. Dalam tulisan ini penulis mencoba menelusuri beberapa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan konsumen muslim terhadap makanan haram.

B. Ketentuan Makanan Dalam Islam

Dalam Islam masalah makanan mendapat perhatian penting dan dalam kitab-kitab fikih masalah makanan (dan minuman) merupakan bab tersendiri dalam pembahasannya.

Hal penting yang harus diperhatikan setiap muslim dalam mengkonsumsi makanan adalah bahwa makanan tersebut halal dan baik (*halalan thoyyiban*), sebagaimana yang diperintahkan Allah dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah 168 yang artinya "*Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu*".

Dari ayat di atas, dapat dilihat bahwa hal pertama yang wajib diperhatikan adalah bahwa makanan itu 'halal'. Pengertian halal di sini mencakup tiga aspek, yaitu:

- a. halal dari segi zat-nya
- b. halal dari segi cara memperolehnya
- c. halal dari segi pengolahannya.

Mengenai halal dari segi zat-nya, dapat dikatakan bahwa semua makanan yang ada di alam ini, baik yang berasal dari tumbuhan ataupun binatang, adalah halal untuk dimakan kecuali yang jelas-jelas diharamkan dalam Al-Qur'an maupun As-sunnah. Khusus makanan yang berasal dari tumbuhan (makanan nabati) tidak ada masalah dalam hukum Islam, yakni Islam tidak melarang makanan nabati ini, kecuali apabila berubah atau diolah sedemikian rupa sehingga berubah menjadi minuman yang memabukkan, seperti beras ketan, anggur, dan sebagainya yang diolah sedemikian rupa sehingga berubah menjadi minuman yang memabukkan. Demikian pula jenis-jenis nabati yang dapat menghilangkan ingatan, merusak akal, melemahkan dan merusak tubuh, seperti ganja dan sebagainya adalah termasuk jenis nabati yang dilarang/haram dimakan.³ Adapun makanan yang berasal dari hewan (makanan jenis hewani), ada sebagian yang dilarang (haram) untuk dimakan oleh orang Islam. Jenis makanan yang diharamkan tersebut tercantum dalam Q.S. Al-Baqarah : 173 dan Q.S. Al-Maidah : 3. Dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 173 dinyatakan sebagai berikut

Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rizqi yang baik-baik yang Kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah jika benar-benar kepada-Nya saja kamu menyembah. Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. Tetapi barang siapa dalam keadaan terpaksa, sedang ia tidak menginginkannya dan tidak melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang

Selanjutnya dalam Q.S. Al-Maidah : 3 Allah menyebutkan makanan-makanan yang haram secara lebih rinci lagi, yaitu yang artinya:

³ H.M. Satibi, "Makanan Halal dan Haram Ditinjau dari Hukum Islam", makalah disampaikan dalam Seminar Makanan Halal Untuk Mencapai Sumber Daya Manusia Sehat Rohani dan Jasmani Dalam Pembangunan Berkelanjutan tanggal 28 Agustus 1993 di Gedung Pertemuan UGM

"Diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, daging hewan yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya dan diharamkan bagimu yang disembelih untuk berhala ...".

Ayat tersebut memerinci terhadap ayat yang disebut sebelumnya, yakni pada ayat sebelumnya hanya menyebut empat jenis makanan yang diharamkan, yaitu bangkai, darah, daging babi, dan hewan yang disembelih atas nama selain Allah, sedangkan pada ayat 3 Surat Al-Maidah menyebutkan sepuluh jenis makanan yang diharamkan. Kesepuluh jenis makanan tersebut adalah sebagai berikut :

1. bangkai

Semua macam bangkai adalah haram untuk dimakan, kecuali bangkai ikan sebagaimana dinyatakan dalam hadits *"laut itu suci airnya dan halal bangkainya"*. Yang dimaksud bangkai disini adalah semua binatang yang mati tanpa disembelih terlebih dahulu. Hikmah diharamkannya bangkai untuk dikonsumsi bagi umat Islam sangat nampak sekali bila dilihat dari segi kesehatan. Binatang yang mati tanpa disembelih dahulu mengandung banyak bibit penyakit, karena kuman-kuman penyakit yang ada dalam darah akan masuk/merembes ke dalam daging hewan tersebut karena darahnya tidak bisa mengalir keluar.

2. darah

Semua darah yang mengalir keluar dari binatang yang disembelih adalah haram untuk dimakan. Kebiasaan orang awam untuk menampung darah dari binatang yang disembelih untuk kemudian dijadikan makanan (orang Jawa menyebut dengan istilah 'saren') atau dicampurkan pada masakan (misalnya gudeg) adalah suatu hal yang bertentangan dengan syari'at Islam. Dilihat dari segi

kesehatan, darah yang ada pada binatang merupakan sumber bakteri penyakit, sehingga jika darah binatang itu dikonsumsi manusia akan sangat berbahaya.

3. daging babi

Walaupun dalam ayat di atas disebutkan bahwa yang diharamkan hanyalah 'daging' babi, namun menurut penafsiran para ulama berdasarkan ayat di atas yang diharamkan termasuk pula kulit babi, lemak babi, dsb. Pada saat sekarang lemak babi telah diolah menjadi apa yang dinamakan *gelatin*, yang banyak digunakan untuk bahan pembuatan biskuit, permen, cangkang kapsul, dsb.⁴ Dalam tafsir Al-Manar sebagaimana dikutip Sayyid Sabiq dalam Fikih Sunnah, dinyatakan bahwa babi itu jorok dan makanannya yang paling lezat baginya adalah kotoran dan najis. Dia berbahaya untuk semua iklim (daerah) terutama di daerah tropis, sebagaimana dibuktikan oleh berbagai eksperimen. Memakan dagingnya termasuk salah satu penyebab cacat yang mematikan. Di samping itu mengkonsumsi babi mempunyai pengaruh psikologis yang jelek terhadap kehormatan pemakannya.

4. daging hewan yang disembelih atas nama selain Allah

Artinya dengan menyebut selain Allah pada waktu menyembelihnya, sehingga dari ketentuan ini diharamkan untuk memakan daging yang waktu penyembelihannya diniatkan untuk sesajen, untuk persembahan kepada Nyi Roro Kidul, dsb. Ini termasuk diharamkan secara *dieni* (agama) demi menjaga kemurnian tauhid.

5. binatang yang mati karena tercekik,
6. yang dipukul,
7. yang jatuh,
8. yang ditanduk,
9. yang diterkam binatang buas, binatang yang mati karena sebab-sebab seperti disebutkan pada nomor 5 s.d. 9 adalah haram untuk dimakan karena hukumnya

⁴ Aminudin Yakub, "Polemik Keharaman Ajinomoto", artikel dalam harian *Republika* tanggal 16 Januari 2001

⁵ Sayyid Sabiq, 1997, *Fikih Sunnah*, Jilid. 13, cet. ke-7, Terj. H. Kamaluddin A. Marzuki, Alma'arif, Bandung, h. 103

sama dengan bangkai. Walaupun demikian apabila masih sempat menyembelihnya sebelum binatang itu mati karena sebab-sebab di atas, maka dihalalkan untuk memakan dagingnya.

10. binatang yang disembelih untuk berhala Yang dimaksud adalah binatang yang disembelih dalam rangka memuliakan atau mengagungkan *thagut* (berhala).

Disamping berbagai makanan yang diharamkan berdasarkan ayat Al-Qur'an di atas, ada beberapa makanan yang diharamkan berdasarkan Hadits Nabi. Makanan yang diharamkan berdasarkan hadits Nabi adalah (daging) himar/keledai, baghal (peranakan kuda dan keledai), serta setiap binatang buas yang bertaring, seperti harimau, gajah, beruang dan sebagainya, termasuk juga burung buas pemakan daging, seperti elang, gagak, dsb.

Walaupun beberapa makanan di atas telah dinyatakan haram menurut Al-Qur'an maupun As-Sunnah, namun dalam keadaan terpaksa (darurat) dibolehkan memakannya asal tidak berlebih-lebihan. Hal ini didasarkan pada ketentuan Q.S. Al-Baqarah : 173 sebagaimana telah dikutip di atas yang menyatakan "...tetapi barang siapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang ia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang".

Kriteria kehalalan makanan yang kedua adalah halal dari segi cara memperolehnya. Binatang atau makanan apa saja yang halal dimakan dapat berubah menjadi haram lantaran salah memperolehnya menurut syari'at Islam, seperti makanan yang dibeli dengan uang hasil korupsi, curian dan sebagainya. Demikian pula makanan yang diperoleh dengan jalan menipu, *ghasab*, memaksa orang lain dan sebagainya adalah haram dimakan meskipun makanan itu sendiri termasuk jenis makanan yang halal.

Hal ini didasarkan pada ketentuan Allah dalam Q.S. Al-Baqarah : 188 yang artinya "*Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil*".

Kriteria ketiga tentang kehalalan makanan adalah halal dari segi pengolahannya atau lebih khusus lagi halal dari segi penyembelihannya. Walaupun suatu makanan atau hewan termasuk halal dimakan, tetapi kalau tata cara penyembelihannya tidak sesuai syari'at Islam maka akan mengakibatkan makanan itu haram untuk dimakan. Tata cara atau syarat-syarat penyembelihan menurut syari'at Islam adalah sebagai berikut:

1. Menggunakan alat/pisau yang tajam yang dapat memotong urat nadi, sehingga mampu mengalirkan darah. Perlu diketahui bahwa alat yang dimaksud tidak harus pisau tetapi bisa alat lain asalkan bukan tulang atau gigi.
2. Pemotongan dilakukan di atas leher/tenggorokan, sehingga kematian binatang tersebut benar-benar akibat dari pemotongan atau penyembelihan. Perlu diketahui bahwa untuk lebih sempurnanya, maka penyembelihan itu dengan memotong sampai putus kedua urat besar pada leher dan kedua saluran yang terdapat di leher. Dalam keadaan tidak dapat melaksanakan rukun kedua ini, maka cukup dengan menusukkan pisau atau alat yang tajam, atau melukainya di bagian mana saja yang memungkinkan. Umpamanya seekor kambing yang terjerumus ke dalam sumur dengan kepala menungging, maka menyembelihnya cukup dengan menusuk atau melukai pantat atau perutnya sampai mati.
3. Tidak menyebut nama selain Allah.
4. Menyebut atau disebut asma Allah dikala menyembelih (Perhatikan Q.S. Al-An'am

⁶ *Ibid.*, h. 109. Lihat juga Sulaiman Rasjid, 1997, *Fiqh Islam*, Sinar Baru Algensindo, Bandung, h. 467 dan Zakiah Daradjat, 1995, *Ilmu Fiqh*, Jilid 1, Dana Bhakti Wakaf, Jakarta, h. 463 - 465

⁷ H.M. Satibi, *op.cit.*, h. 8

: 118 dan 121). Dalam sebuah hadits riwayat Al-Bukhari, Rasulullah pernah bersabda yang artinya "Apa yang mengalirkan darah dan disebut asma Allah atasnya, makanlah".⁸

Selain syarat-syarat di atas, ulama lainnya menambahkan satu syarat lagi, yaitu:

5. Bahwa si penyembelih adalah orang yang berakal, baik ia seorang pria maupun wanita, baik muslim maupun ahli kitab.

Berkaitan dengan masalah tersebut, daging-daging yang didatangkan dari negara di luar negara Islam adalah halal, asalkan memenuhi dua syarat, yaitu:

1. Bahwa daging itu adalah yang dihalalkan oleh Allah
2. Bahwa daging itu disembelih dengan sembelihan yang dibenarkan syari'ah.

Jika tidak memenuhi kedua syarat ini, ia termasuk daging yang diharamkan, seperti babi, atau penyembelihannya tidak sesuai dengan syari'at, dalam keadaan ini,¹⁰ ia dilarang dan tidak dihalalkan memakannya.

Disamping halal, hal lain yang wajib diperhatikan oleh setiap muslim dalam mengkonsumsi makanan adalah bahwa makanan tadi haruslah *thoyyib*. Arti *thoyyib* adalah bahwa makanan tadi baik untuk dikonsumsi dilihat dari segi kesehatan, tegasnya makanan tadi haruslah sehat, bergizi, dan tidak mengandung racun. Dengan kriteria *thoyyib* ini, setiap muslim dilarang memakan makanan yang sudah daluwarsa sekalipun makanan tadi halal. Makanan yang sudah daluwarsa sangatlah membahayakan bagi kesehatan manusia bila dikonsumsi.

Disamping halal dan *thoyyib*, ada hal lain yang perlu diperhatikan oleh setiap muslim yaitu tidak boleh berlebih-lebihan dalam hal makan, sebagaimana difirmankan Allah dalam Q.S. Al-A'raaf: 31 yang menyatakan

"Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid, makan dan minumlah, dan jangan berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan".

Hal ini juga dinyatakan dalam Hadits Nabi yang menyatakan "Kita adalah kaum yang tidak akan makan sehingga lapar dan apabila makan kita tidak sampai kenyang". Hadits ini dilatarbelakangi oleh suatu peristiwa ketika ada seorang tabib dari Mesir yang dikirimkan ke Madinah sebagai persahabatan antara penguasa Mesir dengan Rasul untuk membantu meningkatkan kesehatan atau mengobati penyakit yang diderita penduduk Madinah. Setelah sekian lama bertugas di Madinah, jarang sekali tabib tadi menemukan orang yang sakit, sebaliknya hampir semua penduduk Madinah sehat. Melihat kenyataan seperti ini, tabib tersebut menanyakan kepada Rasul apa rahasianya dan Rasul-pun menjawab seperti apa yang tertera dalam hadits di atas

Menurut ilmu kesehatan, sebagian besar penyakit bersumber dari perut artinya berasal dari makan. Makan secara berlebih-lebihan merupakan sebab yang potensial untuk timbulnya penyakit. Makanan yang halal dan baik serta bergizi pun kalau dikonsumsi secara berlebih-lebihan akan menimbulkan penyakit. Misalnya saja daging kalau dikonsumsi secara berlebihan bisa menimbulkan penyakit jantung karena kandungan kolesterolnya cukup tinggi, demikian juga susu kalau dikonsumsi secara berlebihan bisa menimbulkan diare, dsb. Bagi orang Islam makan dan minum bukanlah tujuan hidup, melainkan hanya sebagai alat agar tubuh menjadi kuat untuk menjalankan ibadah kepada Allah. Oleh karena itu orang Islam tidak pantas untuk makan sekenyang-kenyangnya demi memuaskan hawa nafsunya.

⁸ *Ibid.*, h. 9, Sulaiman Rasjid, *op.cit.*, h. 470 - 471

⁹ Sayyid Sabiq, *op.cit.*, h. 122, Zakiah Daradjat, *op. cit.*, h. 444

¹⁰ Sayyid Sabiq, *op.cit.*, h. 115. Lihat juga Yusuf Qardhawi, 1995, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, Jilid 1, Gema Insani Press, Jakarta, h. 806 - 808

C. Hikmah Makanan yang Halal dan Thoyyib

Makanan yang thoyyib sangat penting artinya bagi kesehatan jasmani, sedangkan makanan yang halal sangat penting artinya bagi kesehatan ruhani atau kesehatan jiwa. Berikut ini kutipan beberapa hadits nabi tentang arti pentingnya makanan yang halal.

a. H.R. Ali r.a.

"Barang siapa yang hidupnya dari makanan yang serba halal, maka bersinarlah agamanya, lemah lembutilah hatinya dan tiada dinding penghalang dari do'a-do'anya. Dan barang siapa yang makan makanan yang subhat, maka samarlah agama dan gelaplah hatinya. Dan barang siapa memakan barang yang haram, hatinya menjadi mati, agamanya menjadi lemah, keyakinan kurang dan Allah menutup pintu do'anya dan ibadahnya sangat sedikit"

b. H.R. Ibnu Mardawiyah dari Ibnu Abbas r.a.

"Rasulullah bersabda, "wahai Sa'ad perbaikilah makananmu, niscaya do'a engkau akan makbul", sesungguhnya seseorang yang menelan sesuap makanan haram, maka ibadahnya tidak akan diterima selama empat puluh hari (selama makanan itu masih berada dalam tubuhnya)".

D. Perlindungan Konsumen Muslim dari Peredaran Makanan Haram dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia

Tujuan negara Indonesia sebagaimana tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 antara lain adalah hendak mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, sejahtera lahir batin serta hendak melindungi segenap warga negara. Dari kaca mata hukum hal tersebut berarti negara harus memberikan rasa aman bagi setiap warga negara dalam

melakukan setiap aktivitas kehidupannya. Banyak hal yang berkaitan dengan masalah perlindungan hukum, salah satunya adalah di bidang pemenuhan kebutuhan pangan. Bagi konsumen muslim, pangan tidaklah cukup memenuhi kriteria aman, bermutu, dan bergizi saja, tetapi makanan juga harus memenuhi kriteria halal.

Pada saat sekarang telah banyak beredar produk-produk makanan baik buatan dalam negeri maupun yang didatangkan dari negara lain. Mengingat sebagian besar makanan yang beredar bukan lagi berbentuk atau berujud asli yang relatif lebih mudah dikenali halal haramnya, tetapi sudah menjadi makanan olahan maka hal ini sering menimbulkan keragu-raguan tentang kehalalan makanan tersebut. Oleh karena itu diperlukan upaya-upaya untuk melindungi konsumen muslim yang merupakan konsumen terbesar di Indonesia dari makanan haram. Dalam hal ini secara yuridis formal Indonesia sudah memiliki aturan hukum positif, yaitu Undang-undang nomor 7 tahun 1996 tentang Pangan dan Undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Dalam Undang-undang nomor 7 tahun 1996, selain ditentukan bahwa pangan harus memenuhi standar kesehatan (*thoyyib* dalam istilah hukum Islam) juga dijumpai beberapa ketentuan yang mensyaratkan label *halal* bagi pangan yang diperdagangkan yang memberi petunjuk tentang kehalalan atas produk makanan tersebut. Hal ini cukup penting bagi perlindungan konsumen muslim. Menurut undang-undang tersebut pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan atau pembuatan makanan atau minuman.¹¹ Adapun pengertian

¹¹ Pasal 1 ayat (1) UU no. 7 tahun 1996

pangan halal dapat dilihat dalam Peraturan Pemerintah nomor 69 tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan yang menyatakan bahwa pangan halal adalah pangan yang tidak mengandung unsur atau bahan yang haram atau dilarang untuk dikonsumsi umat Islam, baik yang menyangkut bahan baku pangan, bahan tambahan pangan, bahan bantu dan bahan penolong lainnya termasuk bahan yang diolah melalui proses rekayasa genetika dan iradiasi pangan, dan yang pengolahannya dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum Islam.¹²

Dalam Undang-undang Pangan Bab IV tentang Label dan Iklan Pangan dinyatakan bahwa setiap orang yang memproduksi atau memasukkan ke dalam wilayah Indonesia pangan yang dikemas untuk diperdagangkan wajib mencantumkan label pada, di dalam, dan atau di kemasan pangan.¹³ Yang dimaksud label adalah setiap keterangan mengenai pangan yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya, atau bentuk lain yang disertakan pada pangan, dimasukkan ke dalam, ditempelkan pada,¹⁴ atau merupakan bagian kemasan pangan.

Tujuan pemberian label pada pangan yang dikemas adalah agar masyarakat yang membeli dan atau mengkonsumsi pangan memperoleh informasi yang benar dan jelas tentang setiap produk pangan yang dikemas, baik yang menyangkut asal, keamanan, mutu, kandungan gizi, maupun keterangan lain yang diperlukan sebelum memutuskan akan membeli dan atau mengkonsumsi pangan tersebut.

Label memuat sekurang-kurangnya keterangan mengenai: a. nama produk, b. daftar bahan yang digunakan, c. berat bersih/isi bersih, d. nama dan alamat pihak yang memproduksi atau memasukkan pangan ke dalam wilayah Indonesia, e. keterangan tentang halal, f.

tanggal, bulan, dan tahun kedaluwarsa.¹⁵ Setiap orang yang menyatakan dalam label atau iklan bahwa pangan yang diperdagangkan adalah sesuai dengan persyaratan agama atau kepercayaan tertentu bertanggung jawab atas kebenaran pernyataan berdasarkan persyaratan agama atau kepercayaan tersebut.¹⁶

Pencantuman keterangan halal untuk suatu produk pangan mempunyai arti penting bagi masyarakat Indonesia yang mayoritas memeluk agama Islam. Namun pencantumannya pada label pangan baru merupakan kewajiban apabila setiap orang yang memproduksi pangan dan atau memasukkan pangan ke dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan menyatakan bahwa pangan yang bersangkutan adalah halal bagi umat Islam. Adapun keterangan tentang halal dimaksudkan agar masyarakat terhindar dari mengkonsumsi pangan yang tidak halal (haram). Dengan pencantuman halal pada label pangan dianggap telah terjadi pernyataan dimaksud dan setiap orang yang membuat pernyataan tersebut bertanggung jawab atas kebenaran pernyataan itu. Dalam kaitan ini, benar tidaknya suatu pernyataan halal dalam label atau iklan tentang pangan tidak hanya dapat dibuktikan dari segi bahan baku pangan, bahan tambahan pangan, atau bahan bantu lain yang dipergunakan dalam memproduksi pangan, tetapi mencakup pula proses pembuatannya.

Untuk dapat dicantulkannya label halal, terlebih dahulu harus diadakan pengujian atas produk pangan tersebut oleh lembaga yang berwenang. Hal ini didasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (2) PP nomor 69 tahun 1999 yang menyatakan bahwa "Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pedoman dan tata cara yang ditetapkan oleh Menteri Agama dengan

¹² Pasal 1 ayat (5) PP no. 69 tahun 1999

¹³ Pasal 30 ayat (1) UU no. 7 tahun 1996

¹⁴ Pasal 1 UU no. 7 tahun 1996

¹⁵ Pasal 30 ayat (2) UU no. 7 tahun 1996

¹⁶ Pasal 34 ayat (1) UU no. 7 tahun 1996

memperhatikan pertimbangan dan saran lembaga keagamaan yang memiliki kompetensi di bidang tersebut". Lembaga keagamaan yang dimaksud adalah Majelis Ulama Indonesia (MUI).¹⁷ MUI dalam pelaksanaan tugasnya menyerahkan pada Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LP-POM MUI). Dalam lembaga ini bergabung tenaga ahli yang meneliti tentang kehalalan makanan, yang terdiri dari ahli pangan, kimia, biokimia, farmasi, sarjana hukum, dan sebagainya. Apabila setelah diadakan pemeriksaan ilmiah yang seksama oleh LP-POM dan kemudian disidangkan oleh komisi fatwa MUI, ternyata pangan tersebut memenuhi kriteria halal maka MUI akan mengeluarkan Sertifikat Halal. Adapun prosedur penetapan fatwa adalah sebagai berikut :

1. MUI memberikan pembekalan pengetahuan kepada para auditor LP.POM tentang benda dan zat yang haram menurut Syari'at Islam.
2. Para auditor melakukan penelitian dan audit ke perusahaan/pabrik yang meminta Sertifikat Halal.
3. Pemeriksaan terhadap suatu perusahaan tidak jarang dilakukan lebih dari satu kali.
4. Hasil pemeriksaan dan audit tersebut kemudian dituangkan dalam sebuah Berita Acara yang diajukan ke Komisi Fatwa MUI untuk ditelaah.
5. Dalam Sidang Komisi Fatwa, Direktur LP.POM menyampaikan dan menjelaskan isi Berita Acara itu untuk dibahas secara seksama dalam bidang yang khusus diselenggarakan untuk itu.
6. Suatu produk yang masih mengandung bahan yang diragukan kehalalannya, atau terdapat bukti-bukti pembelian bahan produk yang tidak transparan oleh Sidang

Komisi, dikembalikan kepada LP.POM untuk diteliti atau diaudit ulang ke perusahaan yang bersangkutan.

7. Sedangkan produk yang telah diyakini kehalalannya, maka diputuskan fatwa halalnya oleh Sidang Komisi.
8. Hasil sidang Komisi yang berupa Fatwa Halal kemudian *ditanfidzkan*, lalu dibuat Surat Keputusan Fatwa Halal dalam bentuk Sertifikat Halal.¹⁸

Bagi pelaku usaha atau perusahaan yang meminta sertifikat halal terlebih dahulu harus mengisi formulir yang telah disediakan LP.POM, yaitu formulir permintaan sertifikasi halal, formulir pernyataan bahan baku produk dan formulir pernyataan perusahaan. Surat pengajuan sertifikasi halal tersebut kemudian disampaikan kepada LP.POM.MUI dan disertai lampiran yang meliputi sistem mutu termasuk panduan mutu dan prosedur baku pelaksanaannya, spesifikasi bahan baku dan bahan tambahan serta dokumen lain yang dapat mendukung kehalalannya. Selanjutnya LP.POM MUI akan melakukan pemeriksaan/audit ke lokasi produsen setelah formulir beserta lampiran-lampirannya dikembalikan. Jika dipandang ada yang perlu diperiksa secara laboratorium, maka tim pemeriksa akan mengambil sampel di lokasi produsen dan atau di pasar. Hasil pemeriksaan/audit dan hasil laboratorium tersebut kemudian dievaluasi melalui rapat tenaga ahli MUI. Setelah itu hasil pemeriksaan/audit produsen serta hasil analisis laboratorium diserahkan kepada komisi fatwa MUI untuk ditentukan kehalalannya. Setelah mendapat fatwa halal dari komisi fatwa MUI, sertifikasi halal akan dikeluarkan MUI. Produsen yang mendapat sertifikasi halal dapat mengambil sertifikatnya di LP.POM MUI setelah membayar seluruh biaya sertifikasi yang telah ditentukan. Jika kemudian ada perubahan

¹⁷ Penjelasan Pasal 11 ayat 2 PP no. 69 tahun 1999

¹⁸ Anonim, "Lembaga yang Menentukan Kehalalan dan Keharaman", artikel disampaikan dalam Seminar dan Dialog Interaktif *Manajemen Produksi Serta Proses Pangan Yang Halal dan Thoyibah* di Gedung Pertemuan UGM tanggal 17 April 2001

dalam penggunaan bahan baku, bahan penolong atau bahan tambahan dalam proses produksinya, produsen diwajibkan segera melapor ke LP.POM MUI untuk mendapat ketidakterbatasan menggunakannya.¹⁹

Untuk memelihara kehalalan produk, di setiap perusahaan yang telah mendapat sertifikat halal diharuskan mengangkat seorang atau lebih auditor internal.

Sertifikat halal yang dikeluarkan LP.POM MUI mempunyai masa berlaku dua tahun dan dapat diperpanjang. Dalam kaitan ini sewaktu-waktu LP.POM dapat memeriksa kembali kehalalan suatu produk yang telah mendapat sertifikat halal apabila ada laporan dari masyarakat yang meragukan kehalalan produk tersebut.

Sertifikasi halal ini sifatnya sukarela, artinya setiap produsen tidak wajib mengajukan sertifikat halal untuk produk yang dihasilkannya, dan LP POM MUI sendiri sifatnya pasif artinya hanya menunggu produsen yang mengajukan sertifikat halal. Walaupun permintaan sertifikat Halal ini sifatnya sukarela, tetapi bagi produsen yang berwawasan ke depan akan melihat arti penting Sertifikat Halal ini bagi pemasaran produk makanannya, mengingat konsumen muslim merupakan pangsa pasar terbesar di Indonesia.

Dalam hal MUI telah memberikan sertifikat halal atas suatu produk makanan, Departemen Kesehatan dapat mengizinkan pencantuman 'label halal' atas produk tersebut. Dengan demikian perlu dibedakan pengertian sertifikasi halal dan labelisasi halal. Yang dimaksud *sertifikasi halal* adalah pemeriksaan yang rinci terhadap kehalalan produk yang selanjutnya diputuskan kehalalannya dalam bentuk fatwa MUI, sedangkan *labelisasi halal* merupakan perizinan pemasangan kata halal pada kemasan produk dari suatu perusahaan

oleh Departemen Kesehatan.

Untuk memperkuat ketentuan tentang pencantuman label atau keterangan halal, dalam Undang-undang no. 7 tahun 1996 dicantumkan sanksi pidana atas pelanggaran ketentuan tersebut, yang terdapat dalam Pasal 58 yang menyatakan "barang siapa ... (j). memberikan pernyataan atau keterangan yang tidak benar dalam iklan atau label bahwa pangan yang diperdagangkan adalah sesuai menurut persyaratan agama atau kepercayaan tertentu, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) ... dipidana dengan pidana penjara paling lama tiga tahun dan atau denda paling banyak Rp 360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah).

Di samping Undang-undang Pangan yang telah disebutkan di atas, peraturan perundang-undangan lain yang juga memberikan perlindungan konsumen muslim atas peredaran makanan haram adalah Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Undang-undang ini dimaksudkan untuk melindungi semua kepentingan konsumen, yaitu untuk mendapatkan produk dengan iklan dan label yang jujur dan terbuat dari bahan yang sehat, aman, bergizi dan halal. Menurut undang-undang tersebut yang dimaksud konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.²⁰

Konsumen mempunyai beberapa hak, antara lain adalah hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan atau jasa; dan juga hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa;²¹ sebaliknya pelaku usaha wajib memberikan informasi yang benar, jelas dan

¹⁹ Destri Budi Nugraheni, *Sertifikasi dan Labelisasi Halal*, Paper Agama Islam II tahun 1999. Lihat juga Feri Kusnandar dan Joko Hermanianto, "Pedoman Labelisasi/Sertifikasi Halal", dalam *Buletin Teknologi dan Industri Pangan*, Vol. XI, no. 1, tahun 2000 h. 78 - 79

²⁰ Pasal 1 ayat (2) UU no. 8 tahun 1999

²¹ Pasal 4 huruf a, c UU no. 8 tahun 1999

jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan.²²

Ketentuan khusus yang berkaitan dengan perlindungan konsumen muslim atas peredaran makanan haram terdapat dalam Bab IV tentang Perbuatan yang Dilarang bagi Pelaku Usaha, yang antara lain menyatakan "pelaku usaha dilarang memproduksi dan atau memperdagangkan barang dan atau jasa yang tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan "halal" yang dicantumkan dalam label.²³ Selanjutnya bagi pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan tersebut dilarang memperdagangkan barang dan atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari peredaran.²⁴

Untuk lebih memperkuat ketentuan di atas, dalam UU Perlindungan Konsumen dicantumkan sanksi pidana atas pelanggaran ketentuan tersebut. Dinyatakan dalam UU tersebut "pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ... dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)".²⁵ Penuntutan pidana dapat dilakukan terhadap pelaku usaha dan atau pengurusnya.²⁶

Dalam hal terjadi pelanggaran atas kehalalan suatu produk makanan, sanksi pidana yang terdapat dalam Undang-undang Pangan maupun Undang-undang Perlindungan Konsumen dapat diterapkan. Pelanggaran karena memberikan pernyataan atau keterangan yang tidak benar dalam iklan atau label tentang kehalalan suatu makanan dapat dikenakan sanksi pidana yang terdapat dalam UU Pangan dengan ancaman hukuman penjara maksimal tiga tahun atau denda maksimal 360 juta rupiah;

dan untuk pelanggaran karena memproduksi atau memperdagangkan makanan yang tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal sebagaimana pernyataan 'halal' yang dicantumkan dalam label diterapkan sanksi pidana yang terdapat dalam UU Perlindungan Konsumen dengan ancaman hukuman penjara maksimal lima tahun atau denda maksimal dua milyar rupiah. Ketentuan ini rasanya cukup adil bila dikaitkan dengan kerugian (immateriil) yang diderita konsumen muslim akibat mengkonsumsi makanan yang tidak halal. Pemberian sanksi yang cukup berat bagi pelaku usaha yang melakukan pelanggaran, di satu sisi dapat menjerakan pelaku usaha untuk tidak mengulangi perbuatannya dan juga mencegah terjadinya pelanggaran serupa oleh pelaku usaha yang lain, sedangkan di sisi lain hal ini akan melindungi konsumen muslim atas beredarnya makanan yang tidak halal.

E. Penutup

Bagi konsumen muslim, kehalalan suatu makanan merupakan faktor penting yang harus dipertimbangkan sebelum mengkonsumsi makanan tersebut, disamping faktor mutu dan gizi. Hal ini merupakan pelaksanaan ketentuan Allah dalam Al-Qur'an yang menyuruh manusia untuk makan makanan yang halal dan baik (*halalan thayiban*).

Ketentuan hukum dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia (Undang-undang no. 7 tahun 1996 tentang Pangan dan Undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen) untuk saat ini cukup memadai dalam melindungi konsumen muslim atas peredaran makanan yang tidak halal (haram). Persoalannya tergantung pada bagaimana penegakan hukum atas undang-

²² Pasal 7 huruf b UU no. 8 tahun 1999

²³ Pasal 8 ayat (1) huruf h UU no. 8 tahun 1999

²⁴ Pasal 8 ayat (4) UU no. 8 tahun 1999

²⁵ Pasal 62 ayat (1) UU no. 8 tahun 1999

²⁶ Pasal 61 UU no. 8 tahun 1999

undang tersebut dalam praktek, sebab bagaimanapun baiknya peraturan perundang-undangan apabila tidak disertai dengan penegakan hukum yang konsisten tidak akan banyak berarti.

Dalam hal terjadi pelanggaran atas kehalalan suatu produk makanan, sanksi pidana

yang terdapat dalam Undang-undang Pangan maupun Undang-undang Perlindungan Konsumen dapat diterapkan. Pemberian sanksi bagi pelaku usaha yang melakukan pelanggaran mempunyai arti penting bagi upaya melindungi konsumen muslim atas beredarnya makanan yang tidak halal.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan terjemahannya

Anonim, "Lembaga yang Menentukan Kehalalan dan Keharaman", artikel disampaikan dalam Seminar dan Dialog Interaktif *Manajemen Produksi dan Proses Pangan yang Halal dan Thoyyibah* tanggal 17 April 2001 di Gedung Pertemuan UGM

Daradjat, Zakiah, 1995, *Ilmu Fiqh*, Jilid 1, Dana Bhakti Wakaf, Jakarta

Kusnandar, Feri dan Hermanianto, Joko, "Pedoman Labelisasi/Sertifikasi Halal", dalam *Buletin Teknologi dan Industri Pangan*, Vol. XI, No. 1, Tahun 2000

Nugraheni, Destri Budi, *Sertifikasi dan Labelisasi Halal*, Paper Agama Islam II tahun 1999

Qardhawi, Yusuf, 1995, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, Jilid 1, Gema Insani Press, Jakarta

Rasjid, Sulaiman, 1997, *Fiqh Islam*, Sinar Baru Algensindo, Bandung

Sabiq, Sayyid, 1997, *Fikih Sunnah*, Jilid 13,

cet.ke-7, diterjemahkan oleh Kamaludin A. Marzuki, Alma'arif, Bandung

Satibi, H.M., "Makanan Halal dan Haram Ditinjau dari Hukum Islam", artikel disampaikan dalam seminar *Makanan Halal Untuk Mencapai Sumber Daya Manusia Sehat Rohani dan Jasmani Dalam Pembangunan Berkelanjutan* tanggal 28 Agustus 1993 di Gedung Pertemuan UGM

Yakub, Aminudin, *Polemik Keharaman Ajinomoto*, artikel dalam harian Republika tanggal 16 Januari 2001

Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang nomor 7 tahun 1996 tentang Pangan

Undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Peraturan Pemerintah nomor 69 tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan

Surat Kabar
Republika, 16 Januari 2001